

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional yang merupakan upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan negara, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelaksanaan pencapaian tujuan ini salah satunya dicapai melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah secara bertahap dan terencana.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis PD (Renstra PD). Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Tujuan dan Sasaran organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui

perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap PD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah dan bersifat indikatif.

Pemerintah Kota Binjai saat ini telah memiliki Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2025-2029. Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra PD yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra tersebut harus terintegrasi dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota (RPJMD) 2025-2029.

Renstra merupakan komitmen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam urusan pemerintahan bidang perhubungan Kota Binjai serta sebagai pedoman dan acuan dalam

mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah kota Binjai.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029
21. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan dan acuan dalam memberikan tanggung jawab yang sesuai dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Binjai 2025-2029
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka panjang Kota Binjai secara berkesinambungan pada urusan koperasi dan UKM
- c. Menyediakan gambaran kondisi kinerja dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan dan acuan awal (tolak ukur) dalam melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat selama 4 (empat) tahun.

- b. Tersedianya dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan dalam pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta mewujudkan pola pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. Sistematika Penulisan

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah
 - b. Sumber daya perangkat daerah
 - c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan

- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Dinas Koperasi dan UKM, kelompok sasaran layanannya adalah unit kerja).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Kota Binjai Tahun 2025-2029
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaanpengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b) pelaksanaan Kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d) penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f) pemberian dukungan dan melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- g) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) pelaksanaan ketatausahaan Dinas; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dinas;
- i. melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tangga dinas;
- j. mengelola pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (Renstra-SKPD);
- c. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- d. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- e. mengkoordinir penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- f. mengkoordinir penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program dinas;
- i. melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumah-tangga dinas;
- j. mengelola pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Kepala Bidang Koperasi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. melaksanakan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran, kebijakan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan, akreditasi, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, bimbingan terhadap usaha koperasi pertanian dan koperasi non pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran dan kebijakan teknik, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha kelompok, usaha ekonomi produktif (KUEP) yang ada di masyarakat;
- d. menyusun program kerja; dan

- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas fungsinya.

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang industri pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha mikro kecil dan menengah di bidang industri non pertanian dan kerajinan;
- d. melaksanakan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan kepada usaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai sumber-sumber daya yang ada dapat disajikan pada tabel-tabel di bawah ini:

- a. Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Tabel 2.1
Jumlah Pejabat dan Pelaksana

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pejabat Pratama	
2	Pejabat Administrator	
3	Pejabat Pengawas	
4	Pejabat Fungsional	
5	Ketua Tim Kerja	
6	Pelaksana	
7	Pegawai Pemerintah dengan PK	
	Total Pegawai	

Data per April 2025

Tabel 2.2
Jumlah Keseluruhan SDM

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	
2	Pegawai Pemerintah dengan PK	
3	Tenaga Kontrak	
	Total Pegawai	

Data per April 2025

Tabel 2.3
Jenjang Pendidikan SDM Perangkat Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Strata 3 (Doktoral)	
2	Strata 2 (Magister)	
3	Strata 1 (Sarjana)	
4	Ahli Madya 3	
5	SMA	
6	SMP	
7	SD	
	Total	

Tabel 2.4**Pegawai yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No.	Uraian Diklat	Jumlah
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	0
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	0
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	0
	Total	0

Tabel 2.5**Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai**

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	
2	Eselon III	
3	Eselon IV	
4	JF Perencana	
5	JF Analis Bencana	
6	JF Analis Kebakaran	
7	JF	
8	Pelaksana	

b. Keadaan Sumber Daya Pendukung di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Sebagai pendukung dalam kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6**Keadaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung**

No.	Uraian	Jumlah
1	Luas Lahan Kantor	
2	Luas parkir kantor	
3	Jumlah Gedung atau Bangunan	
4	Jumlah Ruang Kerja	
5	Jumlah Ruang Rapat	
6	Jumlah Aula	

7	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	
8	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	
9	Jumlah toilet	
10	Jumlah Genset	

2.1.3.Kinerja Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

Adapun kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat dari perbandingan antara rencana dengan realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2021-2026. Selain itu juga dapat dilihat dari tingkat serapan anggaran yang telah terealisasi.

Capaian kinerja indikator dan serapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Indikator Kinerja Utama													
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (ADHB)	Angka	-	-	-	11,4	11,6	11,8						
B	Indikator Kinerja Kunci		-	-	-									
1.1	Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk	%	-	-	-	3	5	5						
1.2	Persentase KSP/USP aktif	%	-	-	-	44	48	52						
1.3	Persentase pengelolaan UMKM	%	-	-	-	3	5	5						

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya koperasi usaha simpan pinjam yang memiliki ijin usaha.
- b. Masih rendahnya tingkat Kepatuhan Koperasi, khususnya koperasi sektor real
- c. Masih kurangnya jumlah KSP/USP yang berpredikat “Sehat”.
- d. Masih rendahnya omzet koperasi
- e. Masih rendahnya Pemahaman SDM Koperasi tentang prinsip dan nilai koperasi dalam pengelolaan koperasi
- f. Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil
- g. Masih rendahnya usaha kecil yang berkembang
- h. Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah umkm yang berbadan usaha.
- i. Belum memenuhinya persyaratan kualitas produk untuk ke pasar yang lebih luas.
- j. Masih rendahnya UKM yang mampu mengakses permodalan

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis pemberdayaan Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Menengah merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan (tahun 2025-2029) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2021-2026 dan perlu penyelesaian secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi gubernur khusus pada misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera, adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1) Masih rendahnya daya saing Koperasi dan UMKM

Dari isu tersebut di atas, maka upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan volume usaha/omset koperasi lebih meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan kualitas dan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelas melalui upaya

peningkatan Kualitas usaha kecil sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai misi empat yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera.

2) Peningkatan produk UMKM yang mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual

Peningkatan produk UMKM melalui pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dicapai melalui peningkatan daya saing, perlindungan hukum yang kuat, dan peningkatan nilai ekonomi produk. Beberapa langkah strategis meliputi pendaftaran merek dagang, pendampingan teknis dan informasi HKI dari pemerintah atau lembaga terkait, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pengelolaan HKI.

Dalam undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia dinyatakan bahwa peranan merek sangat penting dalam era perdagangan global (UU RI No. 15, 2001). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan definisi merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dilihat dari definisi Merek, untuk menentukan suatu Merek tidaklah sulit, karena hanya berupa tanda yang memiliki daya pembeda. Merek merupakan aset tak berwujud yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata (UU RI No. 28, 2014).

Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri (UU RI No. 31, 2000). Perlindungan terhadap Desain Industri bersinggungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta, khususnya dalam hal karya seni.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2025-2029 (RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029) secara substansi mengacu pada visi misi hasil proses politik terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai secara langsung pada pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Penetapan Visi dan Misi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (RPJPD Tahun 2025-2045).

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi Kota Binjai

Visi Pemerintah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Binjai yang maju dan sejahtera. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang akan dituju tentang keadaan masa depan yang cita-citakan melalui penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Binjai serta menjadi gambaran tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Adapun pernyataan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai tahun 2025 – 2029 adalah:

“BINJAI MAJU, SEJAHTERA dan BERKELANJUTAN”

Pembangunan dalam memacu kemajuan Kota Binjai secara terus menerus akan dilaksanakan tidak hanya terkonsentrasi pada fisik seperti infrastruktur, modernisasi teknologi dan informasi

serta sarana prasarana umum, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakatnya melalui perbaikan mutu layanan kesehatan, pendidikan, merangsang terciptanya lapangan kerja baru melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan berpedoman pada nilai-nilai budaya dan religi dengan melibatkan peran serta dan partisipatif masyarakat sehingga tujuan kesejahteraan umum dapat tercapai.

Sedangkan makna dari visi Pemerintah Kota Binjai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **MAJU** mengandung makna untuk mewujudkan Kota Binjai yang berkembang pesat melalui inovasi, modernisasi infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta ketahanan kota dalam menghadapi tantangan masa depan.
2. **SEJAHTERA** mengandung makna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup warga.
3. **BERKELANJUTAN** mengandung makna untuk membangun Kota Binjai yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Binjai 2025-2029, mencerminkan komitmen untuk membangun kota yang inovatif, sejahtera, dan ramah lingkungan. Dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan, visi ini bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang inklusif dan

berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi masyarakat, Kota Binjai diharapkan dapat mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh warganya.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi yang baik membantu memperjelas perwujudan visi yang ingin dicapai dan membantu upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan perubahan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Binjai Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, maka dirumuskan 4 (empat) Misi dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kota Binjai tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kesehatan dan Pendidikan serta mendukung Makan Bergizi Gratis bagi anak didik TK, SD dan SMP.

Misi pertama bertujuan untuk mempermudah akses dan kualitas layanan kesehatan serta menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa.

Misi 2 : Meningkatkan Ketahanan Pangan, Ekonomi dan Sosial serta Pemberantasan Kemiskinan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Kedua, meningkatkan ketahanan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi motor penggerak pemberantasan kemiskinan dengan pola sinergi.

Misi 3 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur berbasis Teknologi dan berwawasan Lingkungan.

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kreatif.

Perwujudan penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan transparansi pemerintahan dengan menerapkan E-Government.

Misi RPJMD Kota Binjai 2024-2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan visi RPJMD Kota Binjai, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kota Binjai.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Binjai berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah: **"MENINGKATNYA KONTRIBUSI UMKM DALAM PEREKONOMIAN"**

Sasaran dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai adalah:

- 1) Meningkatkan omset usaha UMKM.**
- 2) Meningkatkan potensi dan ekspansi koperasi**

Penjabaran dari Tujuan dan Saaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
- Meningkatnya akses dan kualitas layanan perlindungan sosial	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	0	10	11	12	14	17	20
		Meningkatnya omset usaha UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)	0	6	8	10	12	14	16
			Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%) (%)	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Angka)	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
			Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang	0	1	2	3	5	7	9

			memiliki HAKI (Pelaku Usaha)							
			Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34
		Meningkatnya potensi dan ekspansi koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79

3.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Renstra, dan merupakan langkah-langkah yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan suatu organisasi. Kebijakan dapat bersifat internal maupun eksternal.

Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan Koperasi dan UKM di Kota Binjai telah dikemukakan di atas, ditempuh strategi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi anggota koperasi
- 2) Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi
- 3) Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi
- 4) Meningkatkan Akses permodalan bagi UMKM
- 5) Meningkatkan kuantitas dan daya saing UMKM dan koperasi melalui penguatan kapasitas dan keterampilan SDM, serta pengembangan kemitraan usaha dengan usaha besar
- 6) Menyelenggarakan dan mengikuti pameran

Pengembangan kebijakan dari strategi di atas antara lain:

- Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
- Memperkuat Ekonomi Kerakyatan melalui UMKM, Industri Kecil dan Menengah untuk menciptakan daya saing, saat ini mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN 2025-2029.

Ringkasan dalam strategi dan kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai dapat dilihat dari tabel berikut:

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
Meningkatkan pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi bisnis bagi pelaku UMKM	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan UKM, terutama dalam tata kelola manajemen usaha
Mempermudah akses permodalan dan insentif bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing	
Memperluas akses pasar melalui ekonomi baru di seluruh kecamatan untuk meningkatkan daya sebar putaran ekonomi	Pencanangan polarisasi pasar dalam pengembangan usaha kecil dan menengah dengan permodalan, pengembangan strategi pasar, dan pengelolaan badan usaha
Mendorong kolaborasi koperasi, UMKM dan pemerintah dalam membangun ekosistem usaha berkelanjutan dan merata	
Peningkatan akses pembiayaan untuk startup dan UMKM di sektor ekonomi kreatif	
Memperkuat promosi produk kreatif lokal melalui platform digital dan jaringan kemitraan nasional maupun internasional	Penguatan promosi melalui even daerah, provinsi, nasional dan bahkan internasional

Memfasilitasi kerja sama antara BUMD dan UMKM untuk memperluas rantai pasokan lokal dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar	Pengembangan studi kelayakan bisnis, pengelolaan aplikasi UMKM dan riset pengembangan pada produk lokal
---	---

Bagan di bawah ini akan menjelaskan keterkaitan seluruh komponen dari Tujuan, Sasaran, juga indikator outcome serta crosscutting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pada Lampiran Renstra ini.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Binjai merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah). Untuk menjalankan fungsi perekonomian daerah dalam rangka mencapai pembangunan Kota Binjai, disusunlah program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Program-Program pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>
- Meningka tnya akses dan kualitas layanan perlindun gan sosial	Meningka tnya kontribus i UMKM dalam perekono mian				Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	
		Meningkatnya omset usaha UMKM			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) (%)	
					Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%) (%)	
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (Angka)	
					Rasio Kewirausahaan Daerah (%) (%)	

					Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	
					Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

					Statistik Sektor Daerah (Dokumen)	Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 3 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	2.17.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

					SKPD (Dokumen)	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung	2.17.01.2.01.000 8 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung

					Statistik Sektor Daerah (Dokumen)	Statistik Sektor Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektor Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.001 0 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01.001 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD

					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.17.01.2.01.001 2 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.17.01.2.01.001 3 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Meningkatnya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan

					Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	2.17.01.2.02.000 3 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

					SKPD (Dokumen)	kasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 6 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	2.17.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

					Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 2 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 3 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 4 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 7 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.000 1 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib	2.17.01.2.04.000 4 - Pendataan dan Pendaftaran

					Retribusi Daerah (Dokumen)	Objek Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah
				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

					Perundang-Undangan (Orang)	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05.000 1 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.000 9 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	2.17.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan

					Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	Perundang- Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.001 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
				Meningkatny a Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum

					Kantor yang Disediakan (Paket)	Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

					(Paket)	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 7 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.000 8 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	2.17.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

					Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 1 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 9 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.001 0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.001 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengorganisasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

				n Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2.17.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan dan

					Kantor yang Disediakan (Laporan)	Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 4 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

					Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2.17.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

					Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan

					Usaha Mikro (Orang)	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,

						Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.000 2 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.000 3 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.000 4 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.000 5 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.000 7 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.000 8 - Pemulihan Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit	2.17.07.2.01.000 9 - Fasilitas Hak Kekayaan

					Usaha)	Intelektual Usaha Kecil
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 0 - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 1 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 2 - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 3 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdapat (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.001 4 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.001 5 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan

						Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
			meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGA N UMKM
				Meningkatny a Kegiatan Pengembang an Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.000 2 - Pengembangan Usaha Mikro
					Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	2.17.08.2.01.000 4 - Fasilitas Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.000 6 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
		Meningkatnya potensi dan ekspansi koperasi			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) (%)	

			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

					Renja PD yang disusun (Dokumen)	Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

					Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	2.17.01.2.01.000 2 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 3 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
					Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 4 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.000 7 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.000 8 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.17.01.2.01.000 9 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.17.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.17.01.2.01.001 3 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
				Meningkatnya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					nan/Semesteran SKPD (Laporan)	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 3 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.000 5 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.000 6 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	2.17.01.2.02.000 8 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

					Anggaran (Dokumen)	Anggaran
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 1 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 2 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	2.17.01.2.03.000 3 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

					Milik Daerah SKPD (Laporan)	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 4 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.000 6 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.000 7 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat

				Perangkat Daerah		Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.000 1 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
					Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.04.000 4 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2.17.01.2.04.000 5 - Pengolahan Data Retribusi Daerah

				Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05.000 1 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.17.01.2.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 3 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 4 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.000 9 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.17.01.2.05.001 0 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.001 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

					(Orang)	
				Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 1 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 3 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

					(Dokumen)	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.000 7 - Penyediaan Bahan/Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.000 8 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.001 0 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.001 1 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah

				(BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 1 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 5 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.000 9 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.001 0 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.001 1 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatnya Pengelolaan dan Pengorganisasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

				n Daerah		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.000 1 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.000 2 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	2.17.01.2.08.000 3 - Penyediaan Jasa Peralatan

					Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

					Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Pemerintahan Daerah
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	2.17.01.2.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

					dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

				Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

				Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02.000 1 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

			meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.000 3 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.000 4 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
				Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

				ya dalam 1 (Satu) Daerah		
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.000 1 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.000 3 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
			meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN

					Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	DAN LATIHAN PERKOPERASIA N
				Meningkatny a Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasia n Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.000 1 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
			meningkatnya produktivitas koperasi		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

				Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah

						Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	2.17.06.2.01.000 2 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.000 3 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.000 4 - Fasilitasi Kemitraan

					(Unit Usaha)	Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.000 5 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.000 6 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.000 7 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.000 8 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.000 9 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota

TABEL 4.3

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BAS ELI NE TAH UN 202 4	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.17 - URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18.287. 410.000 ,00		18.787. 410.000 ,00		19.690. 549.935 ,00		19.890. 549.935 ,00		20.278. 330.782 ,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				3.500.0 00.000, 00		4.000.0 00.000, 00		4.500.0 00.000, 00		4.700.0 00.000, 00		5.000.0 00.000, 00	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	66,9 1	66, 93	3.500.0 00.000, 00	66, 94	4.000.0 00.000, 00	66, 95	4.500.0 00.000, 00	66, 96	4.700.0 00.000, 00	66, 97	5.000.0 00.000, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi,

													Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000 .000,00		130.000 .000,00		130.000 .000,00		130.000 .000,00		130.000 .000,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	130.000 .000,00	1	130.000 .000,00	1	130.000 .000,00	1	130.000 .000,00	1	130.000 .000,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1	1		1		1		1		1		

	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan	1	1		1		1		1		1		

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)												
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	1	1		1		1		1		1		

	Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	1	1		1		1		1		1		

	Daerah (Berita Acara)												
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1		1		1		1		1		
2.17.01.2.01.001 -				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.003 - Koordinasi dan Penyusunan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.005 -				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.01.007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Terselenggara nya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.01.0 009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.01.0 010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	

Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Renstra PD dan Renja PD													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terkoordinasi kannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

	Diampu (Substansi)												
2.17.01.2.01.0 013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	

Teknis Pembangunan	Teknis Pembangunan (Berita Acara)												
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.170.000.000,00		2.695.500.000,00		3.151.000.000,00		3.279.500.000,00		3.505.000.000,00	
Meningkatnya Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	2.170.000.000,00	12	2.695.500.000,00	12	3.151.000.000,00	12	3.279.500.000,00	12	3.505.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	1	1		1		1		1		1		

	SKPD (Dokumen)												
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	4		4		4		4		4		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	23	25		25		25		25		25		
2.17.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.000.000.000,00		2.525.500.000,00		2.981.000.000,00		3.109.500.000,00		3.335.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23	25	2.000.000.000,00	25	2.525.500.000,00	25	2.981.000.000,00	25	3.109.500.000,00	25	3.335.000.000,00	

	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
2.17.01.2.02.002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
2.17.01.2.02.003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Keuangan SKPD	Keuangan SKPD (Dokumen)												
2.17.01.2.02.004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.02.005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.02.0 006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.02.0 007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	

Semesteran SKPD													
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
2.17.01.2.02.008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	

	Anggaran (Dokumen)												
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00	
Meningkatnya Penyelenggara an Pengadministr asian Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	
	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	0	1		1		1		1		1		

	Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

2.17.01.2.03.0 001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	
2.17.01.2.03.0 002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	
2.17.01.2.03.0 003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00		20.000. 000,00	
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian	Jumlah Laporan Hasil Penilaian	0	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	1	20.000. 000,00	

Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.03.004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.03.005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	

Barang Milik Daerah pada SKPD													
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.03.006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.03.007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemanfaatan	Jumlah Dokumen	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Barang Milik Daerah SKPD	Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)												
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		

2.17.01.2.04.001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.04.004 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.04.005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pengolahan,	Jumlah Laporan Hasil	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)												
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan	1	2		2		2		2		2		

	Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)												
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen	0	1		1		1		1		1		

	Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)												
2.17.01.2.05.001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.05.002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	

	Kelengkapan (Paket)												
2.17.01.2.05.0 003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	
2.17.01.2.05.0 004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	

2.17.01.2.05.005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.17.01.2.05.009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	

2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	

2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.000 .000,00		230.000 .000,00		230.000 .000,00		230.000 .000,00		230.000 .000,00	
Meningkatnya Dokumen Pengelolaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	230.000 .000,00	12	230.000 .000,00	12	230.000 .000,00	12	230.000 .000,00	12	230.000 .000,00	
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	20		20		20		20		20		
	Jumlah Laporan	12	12		12		12		12		12		

	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi	12	12		12		12		12		12		

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12		
2.17.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	

Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)												
2.17.01.2.06.002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
2.17.01.2.06.003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
2.17.01.2.06.004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
2.17.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
2.17.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	

	Disediakan (Dokumen)												
2.17.01.2.06.007 - Penyediaan Bahan/Materi al				5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00	
Tersedianya Bahan/Materi al	Jumlah Paket Bahan/Materi al yang Disediakan (Paket)	2	5	5.000.0 00,00	5	5.000.0 00,00	5	5.000.0 00,00	5	5.000.0 00,00	5	5.000.0 00,00	
2.17.01.2.06.008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	50.000. 000,00	12	50.000. 000,00	12	50.000. 000,00	12	50.000. 000,00	12	50.000. 000,00	
2.17.01.2.06.009 - Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00	
Terlaksananya Penyelenggara	Jumlah Laporan	12	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	

an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)												
2.17.01.2.06.0 010 - Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00		5.000.0 00,00	
Terlaksananya Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	20	5.000.0 00,00	20	5.000.0 00,00	20	5.000.0 00,00	20	5.000.0 00,00	20	5.000.0 00,00	
2.17.01.2.06.0 011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00		10.000. 000,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	1	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	1	10.000. 000,00	

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)												
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				370.000.000,00		380.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	370.000.000,00	1	380.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		

	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Paket Mebel yang	0	1		1		1		2		2		

	Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.07.0 001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	100.000 .000,00	1	100.000 .000,00	
2.17.01.2.07.0 002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		100.000 .000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	100.000 .000,00	

	Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.07.0 005 - Pengadaan Mebel				20.000. 000,00		30.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000. 000,00	1	30.000. 000,00	1	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	2	50.000. 000,00	
2.17.01.2.07.0 006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	100.000 .000,00	2	100.000 .000,00	2	100.000 .000,00	2	100.000 .000,00	2	100.000 .000,00	
2.17.01.2.07.0 009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	

	Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.07.0 010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	
2.17.01.2.07.0 011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	0	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	1	50.000. 000,00	

Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)												
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.000.000,00		203.500.000,00		219.000.000,00		234.500.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengorganisasian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	188.000.000,00	12	203.500.000,00	12	219.000.000,00	12	234.500.000,00	12	250.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
2.17.01.2.08.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.000.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	8.000.000,00	12	8.500.000,00	12	9.000.000,00	12	9.500.000,00	12	10.000.000,00	
2.17.01.2.08.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.000. 000,00	12	60.000. 000,00	12	70.000. 000,00	12	80.000. 000,00	12	90.000. 000,00	
2.17.01.2.08.0 003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000. 000,00		35.000. 000,00		40.000. 000,00		45.000. 000,00		50.000. 000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.000. 000,00	12	35.000. 000,00	12	40.000. 000,00	12	45.000. 000,00	12	50.000. 000,00	
2.17.01.2.08.0 004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00		100.000 .000,00	

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	12	100.000 .000,00	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				132.000 .000,00		81.000. 000,00		90.000. 000,00		96.000. 000,00		105.000 .000,00	
Meningkatnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	132.000 .000,00	1	81.000. 000,00	1	90.000. 000,00	1	96.000. 000,00	1	105.000 .000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10		

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1		
2.17.01.2.09.001 - Penyediaan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	

Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	
2.17.01.2.09.002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00	

Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.17.01.2.09.006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	10.000.000,00	10	12.000.000,00	10	15.000.000,00	10	17.000.000,00	10	20.000.000,00	
2.17.01.2.09.009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00		17.000.000,00		20.000.000,00	

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	17.000.000,00	1	20.000.000,00	
2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi (Unit)	0	1	57.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA				351.384.000,00		351.384.000,00		365.439.360,00		365.439.360,00		365.439.360,00	

SIMPAN PINJAM													
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	10	15	351.384 .000,00	15	351.384 .000,00	15	365.439 .360,00	15	365.439 .360,00	15	365.439 .360,00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta				175.692 .000,00		175.692 .000,00		182.719 .680,00		182.719 .680,00		182.719 .680,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas	0	5	175.692 .000,00	5	175.692 .000,00	5	182.719 .680,00	7	182.719 .680,00	7	182.719 .680,00	

Keanggotaan dalam Daerah	Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)												
2.17.02.2.01.001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				175.692.000,00		175.692.000,00		182.719.680,00		182.719.680,00		182.719.680,00	

Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	5	175.692.000,00	5	175.692.000,00	5	182.719.680,00	7	182.719.680,00	7	182.719.680,00	
2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi				175.692.000,00		175.692.000,00		182.719.680,00		182.719.680,00		182.719.680,00	

dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas Cabang, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	2	175.692.000,00	2	175.692.000,00	2	182.719.680,00	2	182.719.680,00	2	182.719.680,00	
2.17.02.2.02.001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Kas Cabang Pembantu dan				175.692.000,00		175.692.000,00		182.719.680,00		182.719.680,00		182.719.680,00	

Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta													
Terfasilitasiny a Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta (Unit Usaha)	0	2	175.692 .000,00	2	175.692 .000,00	2	182.719 .680,00	2	182.719 .680,00	2	182.719 .680,00	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN				6.515.2 45.000, 00		6.515.2 45.000, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00	

PEMERIKSAA N KOPERASI													
meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	52	65	6.515.2 45.000, 00	67	6.515.2 45.000, 00	71	6.775.8 54.800, 00	73	6.775.8 54.800, 00	75	6.775.8 54.800, 00	2.17.0.00. 0.00.17.0 000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga h Kota Binjai
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				6.515.2 45.000, 00		6.515.2 45.000, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00		6.775.8 54.800, 00	
Meningkatnya Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan	0	245	6.515.2 45.000, 00	250	6.515.2 45.000, 00	255	6.775.8 54.800, 00	260	6.775.8 54.800, 00	260	6.775.8 54.800, 00	

dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)												
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	245		250		255		260		260		
2.17.03.2.01.003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				3.257.622.500,00		3.257.622.500,00		3.387.927.400,00		3.387.927.400,00		3.387.927.400,00	
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan	0	245	3.257.622.500,00	250	3.257.622.500,00	255	3.387.927.400,00	260	3.387.927.400,00	260	3.387.927.400,00	

	Koperasi (Unit Usaha)												
2.17.03.2.01.004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				3.257.622.500,00		3.257.622.500,00		3.387.927.400,00		3.387.927.400,00		3.387.927.400,00	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	0	245	3.257.622.500,00	250	3.257.622.500,00	255	3.387.927.400,00	260	3.387.927.400,00	260	3.387.927.400,00	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				1.266.446.500,00		1.266.446.500,00		1.317.104.360,00		1.317.104.360,00		1.317.104.360,00	

meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	72	75	1.266.446.500,00	75	1.266.446.500,00	78	1.317.104.360,00	78	1.317.104.360,00	80	1.317.104.360,00	2.17.0.00.00.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.266.446.500,00		1.266.446.500,00		1.317.104.360,00		1.317.104.360,00		1.317.104.360,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88	1.266.446.500,00	93	1.266.446.500,00	98	1.317.104.360,00	100	1.317.104.360,00	100	1.317.104.360,00	

Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah													
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88		93		98		100		100		
2.17.04.2.01.001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				633.223.250,00		633.223.250,00		658.552.180,00		658.552.180,00		658.552.180,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88	633.223.250,00	93	633.223.250,00	98	658.552.180,00	100	658.552.180,00	100	658.552.180,00	

2.17.04.2.01.003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				633.223.250,00		633.223.250,00		658.552.180,00		658.552.180,00		658.552.180,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	0	88	633.223.250,00	93	633.223.250,00	98	658.552.180,00	100	658.552.180,00	100	658.552.180,00	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				878.460.000,00		878.460.000,00		896.029.200,00		896.029.200,00		922.910.076,00	
meningkatkan kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	58	60	878.460.000,00	62	878.460.000,00	62	896.029.200,00	65	896.029.200,00	68	922.910.076,00	2.17.0.00.0.00.17.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga

													h Kota Binjai
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				878.460.000,00		878.460.000,00		896.029.200,00		896.029.200,00		922.910.076,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	50	878.460.000,00	50	878.460.000,00	50	896.029.200,00	50	896.029.200,00	50	922.910.076,00	
2.17.05.2.01.001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				878.460.000,00		878.460.000,00		896.029.200,00		896.029.200,00		922.910.076,00	

Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0	50	878.460.000,00	50	878.460.000,00	50	896.029.200,00	50	896.029.200,00	50	922.910.076,00	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				248.897.000,00		248.897.000,00		253.874.940,00		253.874.940,00		258.952.439,00	
meningkatkan produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	69	72	248.897.000,00	72	248.897.000,00	73	253.874.940,00	75	253.874.940,00	75	258.952.439,00	2.17.0.00.000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah				248.897.000,00		248.897.000,00		253.874.940,00		253.874.940,00		258.952.439,00	

Kabupaten/Kota													
Meningkatnya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	5	10	248.897.000,00	10	248.897.000,00	10	253.874.940,00	10	253.874.940,00	10	258.952.439,00	
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	1	2		2		2		2		2		

	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)												
	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahnya (Unit Usaha)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	0	2		2		2		2		2		
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	5		5		5		5		5		
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2	5		5		5		5		5		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam	0	10		10		10		10		10		

	Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)												
2.17.06.2.01.002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.136,00		21.982.136,00		22.707.493,00	
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga	0	10	21.271.000,00	10	21.271.000,00	10	21.982.136,00	10	21.982.136,00	10	22.707.493,00	

Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)												
2.17.06.2.01.003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	

Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi													
2.17.06.2.01.004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2	5	21.271.000,00	5	21.271.000,00	5	21.982.134,00	5	21.982.134,00	5	22.707.491,00	

2.17.06.2.01.005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	1	2	21.271.000,00	2	21.271.000,00	2	21.982.134,00	2	21.982.134,00	2	22.707.491,00	

2.17.06.2.01.006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya (Unit Usaha)	0	2	21.271.000,00	2	21.271.000,00	2	21.982.134,00	2	21.982.134,00	2	22.707.491,00	
2.17.06.2.01.007 - Fasilitas Akses Permodalan				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	

Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	0	2	21.271.000,00	2	21.271.000,00	2	21.982.134,00	2	21.982.134,00	2	22.707.491,00	
2.17.06.2.01.008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	5	21.271.000,00	5	21.271.000,00	5	21.982.134,00	5	21.982.134,00	5	22.707.491,00	

2.17.06.2.01.009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				21.271.000,00		21.271.000,00		21.982.134,00		21.982.134,00		22.707.491,00	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	5	10	21.271.000,00	10	21.271.000,00	10	21.982.134,00	10	21.982.134,00	10	22.707.491,00	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA				3.857.903.500,00		3.857.903.500,00		3.896.482.535,00		3.896.482.535,00		3.935.447.360,00	

MIKRO (UMKM)													
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,17	0,19	3.857.903.500,00	0,20	3.857.903.500,00	0,21	3.896.482.535,00	0,22	3.896.482.535,00	0,23	3.935.447.360,00	2.17.0.00.000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0,011	0,021		0,026		0,031		0,036		0,041		
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan				3.857.903.500,00		3.857.903.500,00		3.896.482.535,00		3.896.482.535,00		3.935.447.360,00	

Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													
Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0	100	3.857.903.500,00	100	3.857.903.500,00	100	3.896.482.535,00	100	3.896.482.535,00	100	3.935.447.360,00	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	500		500		550		550		600		
	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10		10		10		10		10		
	Jumlah SDM yang	0	10		10		10		10		10		

	Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)											
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	0	50		50		50		50		50	
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	50		50		50		50		50	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	500		500		550		550		600	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah		500		500		550		550		600	

	Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)												
2.17.07.2.01.002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				500.000.000,00		500.000.000,00		510.000.000,00		510.000.000,00		520.000.000,00	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	0	500	500.000.000,00	500	500.000.000,00	550	510.000.000,00	550	510.000.000,00	600	520.000.000,00	
2.17.07.2.01.003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	
2.17.07.2.01.004 -				700.000.000,00		700.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		720.000.000,00	

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)		500	700.000.000,00	500	700.000.000,00	550	710.000.000,00	550	710.000.000,00	600	720.000.000,00	
2.17.07.2.01.005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		310.000.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	0	50	200.000.000,00	50	200.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	310.000.000,00	

dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)												
2.17.07.2.01.0 007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/P encatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				200.000 .000,00		200.000 .000,00		200.000 .000,00		200.000 .000,00		200.000 .000,00	
Terfasilitasiny a Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/P encatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	200.000 .000,00	10	200.000 .000,00	10	200.000 .000,00	10	200.000 .000,00	10	200.000 .000,00	

2.17.07.2.01.008 - Pemulihan Usaha Mikro				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	
2.17.07.2.01.009 - Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
2.17.07.2.01.010 - Pendampingan dan Bantuan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

Hukum bagi Usaha Mikro													
Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	
2.17.07.2.01.0012 - Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah				307.903.500,00		307.903.500,00		206.482.535,00		206.482.535,00		200.000.000,00	
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	1	307.903.500,00	1	307.903.500,00	1	206.482.535,00	1	206.482.535,00	1	200.000.000,00	
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat				250.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00	

Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik													
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	500	250.000.000,00	500	250.000.000,00	550	270.000.000,00	550	270.000.000,00	600	300.000.000,00	
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		285.447.360,00	

Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	0	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	300.000.000,00	50	285.447.360,00	
2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	
2.17.08 - PROGRAM				1.669.074.000,00		1.669.074.000,00		1.685.764.740,00		1.685.764.740,00		1.702.622.387,00	

PENGEMBANGAN UMKM													
meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0,016	0,026	1.669.074.000,00	0,031	1.669.074.000,00	0,036	1.685.764.740,00	0,041	1.685.764.740,00	0,046	1.702.622.387,00	2.17.0.00.00.17.000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				1.669.074.000,00		1.669.074.000,00		1.685.764.740,00		1.685.764.740,00		1.702.622.387,00	
Meningkatnya Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	15	1.669.074.000,00	15	1.669.074.000,00	15	1.685.764.740,00	15	1.685.764.740,00	15	1.702.622.387,00	

	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	3	100		100		100		150		150		
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	100		100		100		150		150		
2.17.08.2.01.002 - Pengembangan Usaha Mikro				769.074.000,00		769.074.000,00		785.764.740,00		785.764.740,00		702.622.387,00	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0	100	769.074.000,00	100	769.074.000,00	100	785.764.740,00	150	785.764.740,00	150	702.622.387,00	

n SDM, dan/Kegiatan Lainnya													
2.17.08.2.01.0 004 - Fasilitas Pengembang n Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang				300.000 .000,00		300.000 .000,00		300.000 .000,00		300.000 .000,00		300.000 .000,00	
Terlaksananya Pengembang n Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi (Lembaga)	0	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	15	300.000 .000,00	
2.17.08.2.01.0 006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				600.000 .000,00		600.000 .000,00		600.000 .000,00		600.000 .000,00		700.000 .000,00	
Terfasilitasiny a Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan,	3	100	600.000 .000,00	100	600.000 .000,00	100	600.000 .000,00	150	600.000 .000,00	150	700.000 .000,00	

Serta Desain dan Teknologi	Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)												
----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2. Target Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Seiring RPJMD maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

Beberapa penjelasan indikator pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 4.5

INDIKATOR KINERJA DAERAH PADA RPJMD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79	
2	Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%)	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	
3	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
4	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku Usaha	0	1	2	3	5	7	9	
5	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34	

	Menengah (UKM) Non Pertanian									
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	0	10	11	12	14	17	20	
2	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	0	6	8	10	12	14	16	
3	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90	

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	0	10	11	12	14	17	20
2.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	0	0,61	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79
3.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	0	6	8	10	12	14	16
4.	Proporsi Jumlah UKM non Pertanian (%)	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34
5.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90
6.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
7.	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku Usaha	0	1	2	3	5	7	9
8.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan	%	0	10,66	10,79	10,93	11,07	11,21	11,34

	Menengah (UKM) Non Pertanian								
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.7

INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	positif	Persentase	0	10	11	12	14	17	20
2.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		%	0	6	8	10	12	14	16
3.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	komulatif	Angka	96,51	96,40	96,30	96,20	96,10	96,00	95,90

4.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Persentase	52	60	65	67	71	73	75
5.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	10	15	15	15	15	15	15

Tabel 4.8

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
(01)	(02)	(03)	(04)
1.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
			2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
3.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
4.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	meningkatnya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
6.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
7.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro

			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
--	--	--	---

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Binjai Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra yang telah disusun memuat visi, misi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai tahun 2025-2029 selain merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan tiga tahunan. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, dokumen Renstra yang telah tersusun diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai, baik intern organisasi maupun di lingkup provinsi.

Menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan di pusat dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja selama lima tahun pelaksanaan RPJMD/Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai melakukan revisi yang mendasar terkait program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator dan target.

Dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Binjai Tahun 2025 – 2029 dan berlaku di tahun 2025 ini program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan sesuai target yang direncanakan sehingga pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Binjai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kota Binjai,

.....

NIP.....